

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar, 1999, *Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945*, Bandung, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran,
- Arizona, Yance, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Bachriadi, Dianto, et. al, 2005, *Ketika Penyelenggaraan Pemerintah Menyimpang: Mal Administrasi di Bidang Pertanahan*, Lapera Pustaka Utama bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, Yogyakarta
- Bakri, Muhammad, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Universitas Brawijaya Press, Malang
- Basah, Sjahran, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*, 1994, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, Bandung
- Biersedt, Robert, *An Analysis of Social Power*, 1950, American Sociological Review, Volume 15
- Black'Law Dictionary, 1968, 4th edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota
- Boeke, JH, 1983, *Prakapitalisme Di Asia*, Sinar Harapan, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, Burhan, 2007, *Metodologi penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chalmers, Ian, 1997, "Introduction", ", Ian Chalmers and Vedi R. Hafiz (edt), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, London and New York, Rodledge
- Fauzi, Noer, 2002, *Land Reform: Agenda Pembaruan Struktur Agraria Dalam Dinamika Panggung Politik*, dalam Endang Suhendar, 2002, *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun*, Akatiga, Bandung
- Ginting, Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agrobisnis : Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor

- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Hajati, Sri, 2003, *Pengaturan Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Investasi*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya
- Harjono, Dhaniswara K., 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Hatta, Muhammad, 1977, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta
- Hatta, Mohammad, 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta
- Hoogvelt, Ankie MM, 1985, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, cetakan ke sembilan, Kanisius, Yogyakarta
- Hutagalung, Arie Sukanti, dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ismail, Nurhasan, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan; Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) bekerjasama dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta-Yogyakarta
- Luthfi, Ahmad Nashih., Razif dan M. Fauzy, 2011, *Kronik Agraria Indonesia. Memperluas Imajinasi lintas zaman, sektor dan aktor*, STPN, SAINS dan Institute Sejarah Nasional Indonesia, Yogyakarta
- Mallarangeng, Rizal, 2008, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992*, Cetakan Ketiga, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Manan, Bagir, 1995, *Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian*, Seminar Hukum Nasional Pertambangan, LP-Unpad, Bandung
- Marzuki, H.M. Laica, Siri, *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, 1995, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum*, Edisi III, Liberty, Yogyakarta
- _____, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta
- Mishra, Rames, 1984, *The Welfare State in Crisis*, Helfelster Wheatsheaf, hal. 180, sebagaimana dikutip Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, 2002, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Sinar Grafika, Jakarta
- Notonagoro, 1984, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Nurjaya, I Nyoman, 2005, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol.2, No.1, Maret 2005
- Nurlinda, Ida, 2009 *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Parlindungan, AP., 1991, *Komentar Atas Undang-Undang Hukum Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Rahaedjo, Iman Toto K. dan Herdianto WK, 2001, *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Penerbit Grasindo, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Rahmadi Supanca, Ida Bagus, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sodiki, Achmad, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta
- Soedjati, Djiwandono, J., 1991, *Pembangunan Politik, ABRI, dan Demokrasi di Indonesia* dalam Jurnal Ilmu Politik, Nomor 8
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

- _____, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekarno, *Indonesia Menggugat*. Pledoi yang dibacakan pada Pengadilan Negeri (*Landraad*) Bandung pada tahun 1930. Diterbitkan oleh SK Seno, Jakarta. Cetakan Kedua, Tahun 1956
- Soemardjono, Maria SW, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- _____, Maria SW, dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Soepomo, 1950, *Statut Uni Indonesia-Belanda. Dengan sekeddar pendjelasan di bawah tiap-tiap pasal menurut pembijaraan pada waktu perundingan di Konperensi Medja Bundar di Den Haag*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Soewoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritis dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan)* Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya
- Suharto, Sri Maemumah, 1996, *Pengelompokan BUMN dalam Rangka Penyusunan Tolok Ukur pada Evaluasi Kinerja di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga
- Suhartono, Irawan, 2004, *Negara Kesejahteraan, (welfare State; Harapan atau Hayalan)*, Al Mizan Lemlit Unpas, Bandung
- Triwibowo, Darmawan & Sugeng Bahgijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES dan Perkumpulan PraKarsa*, Jakarta
- Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Masyarakat, Unpad, Bandung
- Wertheim, Wim F., 2008, *Jalan Sosialisme Dunia Ketiga: Negara Protektif Versus Pasar Agresif*, Institute Studi Arus Informasi, Jakarta
- Wiradi, Gunawan, 2005, *Masalah Perkebunan Dalam Konteks Reforma Agraria: Mencari Pegangan Ditengah Ketidakpastian*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Pembaruan Agraria Untuk Pembangunan Perkebunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Himpunan Masyarakat Pertanian Indonesia (HIMPINDO) tanggal 25 Mei 2005, di Jakarta

Wyasa Putra, Ida Bagus,. Dkk., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Reflika Aditama, Bandung

Yudhoyono, Susilo Bambang, 2004, *Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik dan Good Governance*, Brighten Press:Versi Pdf

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;

Ketetapan Nomor VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir Untuk Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;

TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (LN. 1958 No 138, TLN No. 1725);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. 1960 No. 104, TLN. 2043);

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1958, No.138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.42);

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (LN. 1967 No.1, TLN No. 2818);

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (LN. 1967- No.8, TLN No.2823);

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (LN. 1967 No. 22);

Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN. 1968 No. 33, TLN No. 2853);

Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (LN. 1974 No. 65, TLN No. 3046);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN.1999 No. 60, TLN.3839);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LN. 1999 No. 167, TLN. No. 3888);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (LN. 2001 No. 136, TLN. 4152);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (LN. 2001 No. 115, TLN. 4327);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (LN.2004 No. 32, TLN. 4377);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN. 2004 No. 118, TLN. 4433);

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN.2004 No.125, TLN. 4437);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN. 2007 No. 67, TLN. No. 4724);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LN. 2007 No. 68, TLN. 4725);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (LN. 2007 No. 84, TLN. 4739);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseeroan Terbatas (LN. 2007 No. 106, TLN. 4756);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (LN. 2008 No. 69, TLN. 4851);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN. 2009 No. 4, TLN. 4959);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. 2009 No. 140, TLN. 5059)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 15 tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (LN. 1960 No. 119, TLN. 2055);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN. 1960 No. 133, TLN. 2070);

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (LN. 1967 No. 36, TLN. 2844);

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (LN 1970 No. 31, TLN No. 2935);

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (LN Tahun 1970 No. 50, TLN No. 2945);

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (LN Tahun 1975 No. 22, TLN No. 3055);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1992 No. 36, TLN No. 3476);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1993 No. 9, TLN No. 3512);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1993 No. 83, TLN No. 3537);

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1994 No. 28, TLN. 3552);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN. 2000 No.54, TLN. 3952)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (LN. 2001 No.154 TLN. 4162)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (LN. 2004 No.45 TLN. 4385)

Keputusan Presiden Nomor 286 Tahun 1968 Panitia Tehnis Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1973 Tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;

Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975 Tentang Kebijaksanaan Di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan;

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 Tentag Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998

Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

Perpres Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Perpres Nomor 111 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak-hak Concessie Dan Sewa Untuk Perusahaan Kebun Besar

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961 tentang Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha Swasta Nasional

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1964 Perubahan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha Swasta Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1977 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Serta Izin Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Untuk Keperluan Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1984 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana / Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Dari Bank Tabungan Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah serta Penerbitan Sertifikatnya;

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal

Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Jurnal, Artikel

Nurjaya, I Nyoman, 2005, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol.2, No.1, Maret 2005

Sulistiowati dan Paripurna, *Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2, 2 Mei 2014

Internet

<http://www.bpn.go.id>

<http://www.bkpm.go.id>

<http://www.peraturan.bkpm.go.id>

<http://kbbi.web.id>

<http://pengertian-isp.blogspot.co.id>